

## **TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGANGGURAN DI INDONESIA (TELAAH SERAPAN TENAGA KERJA SMA/SMK DAN SARJANA)**

**Syamsul Alam**

(Dosen Tetap STIEM Bongaya)

**Abstrak.** Masalah pengangguran merupakan polemik bagi suatu negara. Salah satu faktor yang terkait dengan pengangguran adalah alumni tingkat pendidikan tertentu seperti dari Sekolah menengah maupun perguruan tinggi yang tidak terserap dalam pasar tenaga kerja. Lulusan sekolah menengah atas dihadapkan pada persaingan yang tidak berimbang dengan lulusan sekolah menengah kejuruan dari segi keterampilan dan mentalitas kerja. Ketersediaan lapangan kerja untuk menyerap lulusan SMA masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan lulusan sekolah menengah kejuruan.

Disisi lain melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tidak dapat memberikan jaminan kesuksesan dalam meraih pekerjaan sesuai dengan harapan. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengembangan wawasan mengenai polemik pengangguran di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikan mulai dari lulusan tingkat sekolah menengah hingga perguruan tinggi.

Penelitian ini adalah penelitian literatur dengan objek kajian yaitu literatur-literatur dan dokumen-dokumen yang mengkaji tentang kondisi dunia pendidikan dan ketenagakerjaan di Indonesia dilihat dari perspektif serapan ketenagakerjaan, dimana data yang dikumpulkan adalah data sekunder kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif

**Kata Kunci :** Pendidikan, Pengangguran, Serapan tenaga kerja, SMA/SMK, Sarjana

### **Pendahuluan**

Persoalan yang dihadapi oleh siswa sekolah menengah atas(SMA) maupun sekolah menengah kejuruan (SMK) adalah langkah yang akan mereka ambil setelah menamatkan pendidikan, apakah melangkah melanjutkan pendidikan ke universitas atau harus memilih (atau terpaksa) menjadi tenaga kerja siap pakai? Para remaja yang tak lagi berstatus pelajar ini berada dalam dilema tentang bayang-bayang masa depannya dan hal ini perlu mendapat perhatian serius.

Berkaca pada dari pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, menurut Medianoor (2015) bahwa hanya 60 persen yang bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Data Kemendikbud mencatat serapan tenaga kerja lulusan SMK besar 85 persen dari total 1.170.748 jumlah lulusan SMK tahun 2014. Lebih lanjut dikemukakan bahwa khusus lulusan SMA yang terpaksa mencari kerja, mereka dihadapkan pada persaingan yang tidak berimbang dengan lulusan SMK dari segi keterampilan dan mentalitas kerja. Selain itu, sebanyak 20

persen tenaga kerja lulusan SMA banyak bekerja di sektor tanpa keterampilan, 65 persen *semi-skilled*, statistik ini disebabkan minimnya akses lulusan SMA ke bursa kerja dan mengambil lapangan kerja yang diperuntukkan untuk lulusan SD dan SMP.

Disisi lain bagi mereka yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tidak serta merta mendapatkan jaminan kesuksesan dalam meraih pekerjaan sesuai dengan harapan. Menurut data Badan pusat statistik bulan Februari 2015 sebanyak 400 ribu pemuda Indonesia yang bertitel sarjana menjadi pengangguran (Vatih, 2015).

Pengangguran memberikan problematika tersendiri bagi negara. Pengangguran dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Karena tidak adanya pendapatan yang diterima, pengeluaran untuk membiayai kehidupan sehari-hari pun menjadi terganggu. Makin tinggi jenjang pendidikan si penganggur, akan semakin berbahaya bagi negara. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat berharap banyak dengan mengenyam pendidikan tinggi, yakni untuk mendapatkan pekerjaan yang didambakan dan kemudian meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, kesempatan kerja yang terbatas telah membuat kompetisi semakin ketat antar pencari kerja dan seringkali mereka melamar dan menerima pekerjaan apa saja meskipun tidak sesuai dengan kualifikasinya (Purna et al, 2010).

Hal inilah yang menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam peluang bagi para pencari kerja apakah langsung mencari kerja setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA/SMK ataukah setelah menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di perguruan tinggi.

## **B. Kajian Teori dan Hasil Studi Empiris**

Pengangguran terjadi seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya, (Sukirno:2010). Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori yakni, 1) Pengangguran normal merupakan seseorang yang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya tersebut, 2) pengangguran struktural merupakan kondisi yang muncul ketika upah minimum berada di atas tingkat harga yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja, dan 3) pengangguran konjungtur yakni pengangguran sukarela, dikatakan sukarela karena mereka adalah tenaga kerja yang tidak mau bekerja dibawah tingkat upah riil dan hanya mau bekerja apabila upah sama atau lebih tinggi dari upah riil.

Berbagai penelitian terdahulu mengungkapkan sejumlah fakta bahwa terdapat suatu hubungan yang erat antara penyerapan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan dengan tingkat pengangguran yang terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Edy (2009) menganalisis pengaruh pendidikan sumber daya manusia terhadap pengangguran di provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa tingkat pendidikan, dan indeks pembangunan

manusia mempengaruhi pengangguran karena seseorang yang memiliki pendidikan tinggi akan cenderung mencari pekerjaan pada daerah propinsi baru, karena hal ini lebih membuat keleluasaan bersaing di daerah atau propinsi lain yang memiliki leading sektor usaha sesuai dengan pendidikan yang dimilikinya.

Hasil penelitian Anggun Kembar Sari (2012) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh signifikan yang positif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat, serta upah berpengaruh signifikan yang negatif terhadap pengangguran terdidik di Sumatera Barat. Maka disarankan kepada Pemerintah Sumatera Barat untuk lebih memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan berkaitan dengan permasalahan publik dan makroekonomi yaitu dibidang pendidikan serta pertumbuhan ekonomi. Selain itu bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Sumatera Barat diharapkan untuk lebih memperhatikan lagi kesejahteraan para pekerjanya agar dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang dapat menguntungkan perusahaan itu sendiri.

Hasil penelitian suaidah, imarotus dan cahyono hendry (2013) menemukan bahwa tingkat pengangguran dipengaruhi oleh tingkat pendidikan terutama lulusan SMA/Aliyah di Kabupaten Jombang. Lulusan SMA/aliyah yang bertambah mempengaruhi besarnya tingkat pengangguran. Koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.561188 menunjukkan tingkat pendidikan berpengaruh 56,11% terhadap tingkat pengangguran, sedangkan sisanya 43,89% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kesimpulan penelitian bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Jombang. Kata kunci : tingkat pendidikan, lulusan SMA/Aliyah, tingkat pengangguran

Dalam penelitian *education and regional economic growth in Central Java*, kemukakan Supartoyo et,al (2013) yang mengutip oleh Sodik dan Nuryadin (2005) ditemukan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi regional dipengaruhi oleh investasi dan pertumbuhan lulusan sekolah menengah pertama. Namun pertumbuhan lulusan sekolah menengah atas dan pertumbuhan lulusan sekolah dasar tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional Jawa tengah. Penelitian Voss, et all (2004) mengungkapkan bahwa pengangguran memiliki hubungan dengan tingkat pendidikan seseorang, rendahnya tingkat pendidikan seseorang menjadi salah satu faktor yang memiliki hubungan kuat dengan pengangguran.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar selama 1 (satu) bulan

dengan mengumpulkan data-data sekunder berupa data yang diperoleh dari jurnal, buku dokumentasi, dan internet.

### **Studi Literatur**

Studi literatur digunakan untuk melakukan kajian teoritis, literatur dan berbagai hasil penelitian dengan menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan pendidikan dan pengangguran serta daya serap lapangan kerja terhadap para lulusan SMK/SMA dan Sarjana dari berbagai sumber seperti jurnal, buku dokumentasi, internet dan pustaka.

### **Metode Analisis Data**

Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

### **Pembahasan**

Berangkat dari konsep teori dan hasil penelitian yang dikemukakan diatas maka setidaknya terdapat 3 alasan yang menjadi sebab utama mengapa ada begitu banyak sarjana pengangguran di Indonesia Vatih (2015) menjabarkan dibawah ini.

Dampak dari bangkrutnya perusahaan, banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaanya. PHK dilakukan oleh beberapa perusahaan dalam rangka efisiensi agar produksi tetap berjalan. Di sisi lain pencari kerja baru bermunculan ke permukaan yang ikut bertanding dalam memperebutkan lapangan kerja.

Dengan demikian jumlah pengangguran meningkat secara tajam, sebagai akumulasi dari akibat PHK dan angkatan kerja baru. Sementara daya serap lapangan kerja sangat minim karena tidak adanya pembukaan usaha baru. Anehnya di antara membludaknya angka pengangguran tersebut, ternyata masih ada beberapa lowongan pekerjaan yang tidak terisi. Lowongan tersebut tidak dapat terisi karena adanya tuntutan keahlian, ketrampilan, dan keprofesionalan yang kurang dimiliki oleh tenaga kerja lulsan lembaga pendidikan Indonesia. Lembaga pendidikan hanya mampu meluluskan tenaga kerja yang tidak siap pakai. Akibatnya banyak pengangguran terdidik yang tidak terserap oleh lapangan kerja.

Banyak dampak yang potensial terjadi dari pengangguran tenaga kerja terdidik. Oleh karena itu perlu upaya nyata dari dunia pendidikan untuk menyiapkan lulusannya agar mampu terserap oleh lapangan kerja. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pencermatan kembali substansi kurikulum. Kurikulum harus mampu memberikan pengalaman nyata terhadap peserta didik. Kewiraswastaan menjadi mata kajian yang harus diajarkan sejak SLTA.

Selanjutnya program magang perlu dirumuskan kembali dengan melibatkan dunia usaha dan dunia industri agar implementasinya dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap penyiapan tenaga kerja. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, maka pengangguran dan khususnya pengangguran tenaga kerja terdidik dapat dikurangi jumlahnya.

**Pertumbuhan Ekonomi Rendah.** Semua sepakat bahwa faktor ini termasuk faktor kunci yang menentukan seberapa besar jumlah pengangguran pada suatu negara. Melihat pada rumus yang berlaku secara internasional, tingkat pengangguran di Indonesia sebenarnya hanya 5.81%. Bisa dibandingkan dengan negara yang lebih maju seperti Perancis 9% dan Spanyol 23%. Tapi, angka ideal untuk bisa dikatakan sebagai negara yang sejahtera, pengangguran harus di bawah 3%. Bukan berarti sebuah negara menjadi semakin bagus ketika tidak memiliki SDM yang menganggur. Justru hal ini sangat berbahaya karena perusahaan akan kesulitan menjadi SDM baru.

Ada rumusan lain tentang bagaimana sebuah negara bisa berada pada posisi angka pengangguran yang ideal (yaitu 2-3 %). Untuk bisa di angka itu, sebuah negara harus bisa growth ekonominya di kisaran 8 sampai 10 persen. Faktanya, hingga saat ini pertumbuhan ekonomi negara kita hanya di angka rata-rata 4,7% saja. Masih setengah perjalanan. Angka 8% sampai 10% itu hanya berlaku di negara berkembang dengan luas wilayah yang besar, seperti India, Cina, dan Indonesia. India dan Cina sudah pernah mencapai angka itu beberapa kali, sedangkan Indonesia belum sama sekali. Dikarenakan pertumbuhan yang cenderung lambat, sektor industri juga 'malas' untuk membuat rencana pengembangan infrastruktur dan SDM. Nah karena pengembangan (SDM) yang cenderung stagnan, maka komunitas sarjana pengangguran tumbuh bagai jamur di mana-mana.

**Mempunyai Skill dan Cara Berpikir yang Terlalu Maju.** Ternyata, jumlah sarjana pengangguran lebih banyak ketimbang lulusan SMK/SMA yang menganggur. Artinya, lulusan SMK/SMA lebih banyak diserap oleh industri ketimbang lulusan sarjana. Hal ini terjadi akibat, mayoritas sektor industri di Indonesia tidak butuh tenaga yang terlalu pintar. Tenaga yang terlalu pintar dianggap banyak menuntut, terutama soal gaji, ini yang membuat industri berpikir berulang kali untuk merekrut sarjana. Jangankan sektor industri, pengusaha-pengusaha kecil (kelas UKM), pasti lebih memilih lulusan SMK/SMA ketimbang sarjana. Untuk jaga toko, melakukan packaging, mengirim barang, input data, dan hal-hal sederhana lainnya. Lagipula, secara naluri, seorang sarjana tidak mau dipekerjakan sebagai penjaga toko.

**Terlalu Banyak Lulusan Sosial.** Hampir semua perguruan tinggi di tanah air mempunyai fakultas ekonomi dan hukum. Padahal bisa jadi kebutuhan lulusan dari kedua fakultas ini tidak terlalu besar. Kalau bahasa ekonominya terlalu banyak suplai alias over supply, akhirnya yang lebih itu jadi menganggur. Tidak hanya dua fakultas tadi, sarjana seperti manajemen, sospol, sastra, dan lainnya juga bernasib sama. Masih banyak

industri yang membutuhkan tenaga dari lulusan sarjana teknik. Teknik apapun. Masih banyak daratan Indonesia yang membutuhkan SDM dari lulusan teknik. Masih ada ratusan ribu kilometer jalan raya dan ribuan megawat listrik yang butuh untuk dibangun. Studi dan penelitian yang dilakukan World Bank memberitahu pada kita bahwa jumlah sarjana teknik pada sebuah negara sangat berbanding lurus dengan kemajuan negara tersebut. Di Jepang, Korea, Cina, India, persentase lulusan teknik di negara-negara ini sangat tinggi. Maka tidak heran mereka bisa berakselerasi dengan sangat cepat.

Berangkat dari kenyataan tersebut untuk mengatasi pengangguran di Indonesia kita dapat merujuk hasil kajian Bank Dunia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) soal ketenagakerjaan di Indonesia, terdapat lima permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan pelaku usaha. Berikut paparannya seperti dikutip dari merdeka.com yang dikemukakan oleh Medianoor (2015). **Pertama, *outsourcing* masih kurang diperhatikan.** Pekerja alih daya atau *outsourcing* di Indonesia diyakini sangat jauh dari sejahtera. Gaji mereka rata rata berbeda 30 persen dibandingkan karyawan kontrak di perusahaan yang sama. Kebijakan *outsourcing* negara seperti Jepang jauh lebih baik ketimbang di Indonesia, kesetaraan upah merata antara yang berstatus kontrak dan *outsourc*e.

**Kedua, upah kecil.** Masyarakat miskin di Indonesia tidak hanya dari kalangan pengangguran atau pendidikan rendah. Hasil kajian LIPI menyebutkan, sekitar 43,67 persen pekerja Indonesia saat ini masih berada di bawah garis kemiskinan. Pada Februari 2012 silam, 57 persen pekerja informal dan 26,2 persen pekerja formal masih berada di bawah garis kemiskinan. Pekerja yang disurvei berasal dari pelbagai bidang. Semisal pertanian, pertambangan, industri, bangunan, perdagangan, angkutan, keuangan, jasa dan lainnya. Rata rata gaji pekerja formal hanya Rp 1.227.109. Sedangkan untuk informal hanya Rp 779.812. **Ketiga, lapangan kerja tidak sesuai pendidikan.** Persoalan pengangguran di Indonesia dipicu tiadanya kesesuaian antara jenjang pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini memicu tenaga kerja terdidik, justru mengambil lahan pekerjaan kelompok tidak terampil. Berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan pendidikan tinggi baru 5 persen dari total angkatan kerja. Jumlah lulusan perguruan tinggi yang menganggur saat ini lima kali lipat pengangguran dewasa.

**Keempat, akses lowongan kerja sulit.** Bank Dunia menyoroti fenomena lapangan kerja di Indonesia yang tidak sesuai antara kebutuhan pencari kerja dengan pengusaha sebagai pemberi kerja. Fenomena ini disinyalir muncul akibat ketimpangan informasi, terutama di kalangan anak muda yang baru lulus sekolah. 60 persen angkatan kerja muda terlalu mengandalkan informasi dari hasil obrolan dengan teman atau keluarga. Hal ini menandakan adanya kesulitan angkatan kerja untuk mengakses informasi soal pasar kerja.

**Kelima, skill tenaga kerja yang rendah.** Pemerintah wajib memediasi institusi pendidikan dan pengusaha. Dalam hal ini, wajib ada pelatihan di luar bursa kerja untuk menambah keterampilan generasi muda yang baru lulus sekolah. Indonesia harus mendorong diadakannya pelatihan keterampilan dari pemberi kerja. Perlunya dukungan dari pihak pemerintah, penyedia lapangan kerja dan partisipasi aktif siswa untuk meningkatkan keterampilan (khususnya keterampilan komputer dan Bahasa Inggris) yang dirasa berpotensi sebagai daya jual dalam kompetisi mencari kerja. Selain itu para lulusan SMA/SMK harus paham informasi tentang lowongan kerja. Terlebih sistem *apprenticeship* yang berlaku di perusahaan BUMN dan multinasional asing yang bergerak di bidang energi dan mineral bisa menjadi sarana meningkatkan keterampilan sembari digaji dengan layak. Menanti pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan berharap menjadi pegawai negeri sipil masih menjadi alternatif favorit selama ini yang diincar para lulusan SMA/SMK. Menyoal rencana pemerintah ke depannya yang akan menyiapkan kelas pelatihan untuk SMA pun dirasa perlu ditandemkan dengan praktek langsung dan menggunakan mentor dari kalangan *entrepreneur* sukses berpengalaman untuk melatih kemampuan siswa berusaha/berdagang. Agar mereka bisa mandiri selepas lulus sekolah. Merubah *mindset* menciptakan lapangan kerja sendiri ketimbang mencari kerja.

#### **Daftar Pustaka**

- Meidianoor, Alfian. (19 May 2015). *Nasib lulusan sma, kerja atau kuliah? Lapangan Kerja, Tenaga Kerja Siap Pakai, dan Polemik Pengangguran*. <http://undas.co/2015/05/nasib-lulusan-sma-kerja-atau-kuliah>. (Diakses 30 Januari 2016, 12:27).
- Vatih, Ibrahim (4 November 2015). *Jumlah Sarjana Pengangguran Terus Bertambah Setiap Tahun*. <http://rubik.okezone.com/read/19652/jumlah-sarjana-pengangguran-terus-bertambah-setiap-tahun>. (diakses 30 Januari 2016, 12:38)
- Edy, Irwan Christanto. (2009). *Analisis Pengaruh Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pengangguran Di Propinsi Dati I Propinsi Jawa Tengah*. *Jurnal ekonomi bisnis dan perbankan, (online)*, Vol. 17, No.4, (<http://e-journal.stieaub.ac.id>). (diakses 20 Februari 2013).
- Sukirno, Sadono. (2010). *Makroekonomi: teori pengantar*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Sukirno, Sadono.(2010). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Jakarta. Kencana.
- Sodik, Jamzani dan Didi Nuryadin. 2005. *Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. *Economic Journal of Emerging Markets*. Vol. 10, No.2, Hal : 157 – 170.
- Supartoyo, Yesi Hendriani., Tatu, Jen., Sendouw, Recky H. E.(2013). *The Economic Growth and The Regional Characteristics: The Case of Indonesia*. *Bulletin of Monetary, Economics and Banking*, July 2013.

- Tobing, Elwin. (2004). *Pendidikan, Pasar Tenaga Kerja dan Kewiraswastaan*. Jakarta: The Prospect.
- (2005). *Pengangguran Tenaga Kerja Terdidik*. Jakarta: The Prospect.
- Suaidah, Imarotus, cahyono & hendry, 2013. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengangguran Di Kabupaten Jombang* Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE) | Vol 1, No 3, (2013)
- Saliman. 2005. *Dampak Krisis Terhadap Ketenagakerjaan Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 2 Nomor 3, Mei 2005
- Sari, Anggun Kembar. 2012. *Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik Di Sumatera Barat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang 2012